

**RENCANA AKSI**  
**PROGRAM *INTERNSHIP* PEMERINTAH DAERAH KE**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2018**

**I. PROGRAM**

Nama Program : Program *Internship* Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan *Batch I* Tahun 2018  
Tanggal Program : 16 April – 4 Mei 2018  
Lokasi Program : Gd. Radius Prawiro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jln. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

**II. PESERTA PROGRAM**

Nama : Gabriel Rohi Bengngu  
NIP : 19620418 199603 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan  
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah  
Pemerintah Daerah : Kabupaten Sabu Raijua

**III. ATASAN PESERTA PROGRAM**

Nama : Domikianus M. Rihi, S.Sos  
NIP : 19650607 199303 1 011  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan  
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah.

**IV. MENTOR PROGRAM**

Nama : Dyan Adhitya  
NIP : 19830325 200412 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III.b  
Jabatan : AKPD Ahli Pratama  
Unit Kerja : Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah DJPK.

Apakah Anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok (*silakan tulis nama anggota kelompok dalam tabel di bawah ini*)

No.	Nama Anggota Kelompok
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2.	Pejabat dan Staf di Bakeuda
3.	SKPD pengelola Pendapatan Daerah.
4.	Petugas pendataan pajak daerah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5.	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua
6.	Pejabat dari instansi terkait lainnya

1. Gambarkan suatu situasi atau isu dalam institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda yang mungkin dapat Anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi !

a. Ralisasi PDRD belum optimal.

- 1) Penyusunan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) setiap tahunnya tidak didasarkan pada data potensi (hal ini dikarenakan belum memiliki data potensi)
- 2) Realiasi penerimaan PDRD rendah.
- 3)

b. Terdapat piutang PBB P2 yang tidak tertagih yang diserahkan oleh KPP sebesar Rp. 198 Juta.

c. Ada temuan BPK yang berulang tentang dana pemberdayaan TA. 2007-2008 yang belum terselesaikan sebesar Rp. 11 M.

d. Kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai.

2. Apakah judul Rencana Aksi Anda?

**PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) DAN PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH.**

3. Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi Anda tersebut?

a. Rasionalisasi penetapan target penerimaan PDRD serta optimalisasi pemungutan PDRD.

b. Penyelesaian piutang PBB P2.

c. Penyelesaian piutang pemberdayaan TA. 2007-2008.

d. Peningkatan status opini laporan keuangan daerah, dari yang semula WDP menjadi WTP.

4. Uraikan bagaimana Rencana Aksi Anda memenuhi kriteria SMART!

<p><b>S</b> <i>Specific</i> Spesifik</p>	<p><i>Aktifitas spesifik apa yang akan Anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi?</i></p>
	<p><b>Jangka Pendek:</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemutakhiran data PDRD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan tim</li> <li>✓ Rapat koordinasi</li> <li>✓ Bimtek petugas lapangan</li> <li>✓ Perluasan basis data subyek dan obyek PDRD.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifikasi data Piutang PBB P2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan tim</li> <li>✓ Rapat koordinasi</li> <li>✓ Verifikasi data Piutang PBB P2.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyelesaian Piutang Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan tim</li> <li>✓ Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi pengelolaan PDRD.</li> <li>• Penghapusan piutang PBB P2 yang tak tertagih</li> <li>• Penghapusan piutang TA. 2007-2008 yang tak tertagih</li> <li>• Pengelolaan PDRD berbasis IT yang terintegrasi.</li> </ul>
<p><b>M</b> <i>Measurable</i> Dapat diukur</p>	<p><b>Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi?</b>  <b>Berapa orang yang terlibat?</b>  <b>Berapa lama waktu yang dibutuhkan?</b>  <b>Berapa banyak yang diproduksi?</b>  <b>Berapa persentase perubahan yang dicapai?</b></p>
	<p><b>Jangka Pendek:</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemutakhiran data PDRD.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari Bakeuda, Satpol PP, SKPD terkait pemungut PDRD, instansi terkait lainnya dan aparaturnya kecamatan dan desa.</li> <li>• Masa kerja tim 6 bulan</li> <li>• Proses pembentukan tim 2 minggu.</li> <li>• 2 orang x 63 desa/kel, 2 orang x 6 kec, Tim 30 orang (Bakeuda + SKPD lainnya).</li> </ul> </li> <li>- Rapat koordinasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Frekwensi per bulan.</li> </ul> </li> <li>- Bimtek petugas lapangan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan 1 Frekwensi selama 3 hari.</li> <li>• 2 orang x 63 desa/kel, 2 orang x 6 kec, Tim 30 orang (Bakeuda + SKPD lainnya).</li> </ul> </li> <li>- Pendataan subyek dan obyek PDRD.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 bulan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifikasi data Piutang PBB P2.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari Bakeuda, aparatur kecamatan dan desa.</li> <li>• Masa kerja tim 4 bulan</li> <li>• Proses pembentukan tim 2 minggu.</li> <li>• Tim 20 orang (Bakeuda + Kecamatan/Desa/Kel.).</li> </ul> </li> <li>- Rapat koordinasi &amp; sosialisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kali.</li> </ul> </li> <li>- Verifikasi data Piutang PBB P2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 bulan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyelesaian Piutang Daerah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa kerja tim 6 bulan</li> <li>• Proses pembentukan tim 2 minggu.</li> <li>• Tim 30 orang (Bakeuda + SKPD lainnya), Instansi terkait lainnya.</li> </ul> </li> <li>- Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 kali</li> <li>• Pemda dan DPRD.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Jangka Panjang:</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modernisasi pengelolaan PDRD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan modernisasi</li> <li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kegiatan</li> <li>- Tersedianya <i>roadmap/blue print</i> Modernisasi Pengelolaan PDRD</li> <li>- Implementasi (instalasi dan pelatihan)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penghapusan piutang TA. 2007-2008.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Ranperda penghapusan piutang daerah.</li> <li>- Pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang tak tertagih.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengelolaan PDRD berbasis IT yang terintegrasi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi aplikasi/system yang ada dan yang dibutuhkan</li> <li>- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kegiatan</li> <li>- Tersedianya <i>aplikasi Pengelolaan PDRD</i> yang terintegrasi (<i>e-SPTPD, e-NPWP, e-Taxes, e-Reporting, dll</i>)</li> <li>- Proses Sosialisasi, Bimtek, dan Implementasi</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Achievable</b> Dapat dicapai</p>	<p><i>Apakah alasan Anda, mengapa Anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi tersebut dapat diimplementasikan?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang diemban saat ini.</li> <li>2. Anggaran dapat disediakan.</li> <li>3. Adanya dukungan dari pimpinan.</li> </ol>

<p><b><i>R</i></b>elephant Relevant Relevan</p>	<p><b><i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi Anda terhadap: (a) institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda (b) tugas pokok dan wewenang Anda, dan (c) program ini?</i></b></p> <hr/> <p>Sebagian besar dari rencana implementasi atas Rencana aksi ini merupakan bagian dari tugas pokok Bidang Pendapatan Bakeuda saat ini dan merupakan tugas pokok yang sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini.</p>
<p><b><i>T</i></b>imely Rentang/ ketepatan waktu</p>	<p><b><i>Mengapa waktu yang Anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi?</i></b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk implementasi rencana aksi jangka pendek, waktu pelaksanaan rencana aksi masih relatif lama hingga akhir tahun 2018.</li> <li>2. Apabila ada anggaran yang belum tersedia untuk menjalankan aksi ini, masih dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan termasuk menganggarkan pendanaan kegiatan yang mendukung implementasi rencana aksi jangka panjang.</li> </ol>



6. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan sumber daya tersebut?
- **SDM** – membentuk tim kerja teknis, melakukan Pendidikan dan Pelatihan teknis dan non teknis (*change of mind*), dan mengelaborasi pekerjaan antara ASN dan PTT, serta **menyiapkan agen perubahan (*change agent*) di setiap SKPD.**
  - **Anggaran** – memasukkan usulan pendanaan kegiatan melalui DPA.

7. Identifikasi kemungkinan **hambatan** dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Anda? Bagaimana cara Anda **menanggulanginya**?

- **Kepala Badan Keuangan Daerah masih dijabat oleh Plt, menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lebih lama.**  
Dibutuhkan percepatan pelantikan pejabat definitif agar segera dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis.
- **Keterlibatan DPRD untuk penghapusan piutang dalam hal penyusunan Perda penghapusan piutang daerah akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.**  
Sebelum draft Raperda dimajukan, disiapkan data pendukung yang matang serta contoh-contoh dari daerah yang sudah pernah melakukan proses penghapusan piutang dan meminimalisir biaya penyusunan Raperda dengan cara memanggil narasumber yang dibutuhkan ke Kab. Sabu Raijua.
- **Pejabat yang mengikuti program internship dapat dimutasi sewaktu-waktu, sehinggadapat menyebabkan pejabat/staf pengganti membutuhkan waktu untuk beradaptasi.**  
Apabila hal ini terjadi, pejabat yang mengikuti program internship akan melakukan proses pengalihan berkas dan pengetahuan (*transfer knowledge*) yang diperkirakan akan memakan waktu paling cepat 1 minggu.

8. Bagaimana Rencana Aksi Anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kesetaraan gender (*gender awareness*), dan manajemen perubahan (*change management*)?

---

**Pemerintahan yang baik (*good governance*)**

Dengan terlaksananya rencana aksi ini, diharapkan dapat lebih mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat **meningkatkan opini LKPD dari WDP menjadi WTP.**

---

**Kesadaran Gender (*gender awareness*)**

Pelaksanaan rencana aksi ini juga **melibatkan pejabat dan staf perempuan** yang ada di SKPD terkait.

---

---

**Managemen  
Perubahan (*change  
management*)**

Dengan terlaksananya rencana aksi ini, diharapkan adanya **perubahan pola pikir dan etos kerja ASN** baik dari tingkatan terendah sampai dengan tingkatan tertinggi pejabat pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua. Termasuk juga adanya **perubahan mindset dari masyarakat** terhadap pemerintah daerah.

---

Jakarta, 3 Mei 2018  
**Peserta Program,**

**Mengetahui,  
Atasan Langsung Peserta,**

**Gabriel Rohi Bengngu**  
NIP. 19620418 199603 1 001

**Domikianus M. Rihi, S.Sos**  
NIP. 19650607 199303 1 011

**Mentor Program,**

**Dyan Adhitya**  
NIP. 19830325 200412 1 001



## DISKUSI

1. Penghapusan piutang PBB P2..... ini dalam tahap penelusuran.
2. Piutang dana pemberdayaan sudah dilakukan inventarisasi dan pemutahiran data. Tinggal menunggu proses penghapusan.
3. Tahapan penghapusan piutang..... tahapannya menjadi action plan.
4. Perkiraan biaya yang dibutuhkan.
5. Penghapusan piutang di UU tentang perbendaharaan. Hanya butuh persetujuan DPRD bukan dengan perda.
- 6.
7. E-Gov – ada roadmap e-gov diletakkan di atas krn menyangkut e-gov secara keseluruhan.
- 8.